



KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA KADUBALE KECAMATAN BANJAR

Niken Nirmala Asih¹, Bayu Fajar² dan Deni Permana³
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya
nirmalaasih@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu lembaga pemerintah desa yang berperan sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa. Kepala desa sebagai satu-satunya orang yang menjalankan fungsi pemerintahan tertinggi di Desa, Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan desa, beliaulah pemegang kekuasaan desa. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa Kadubale Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi penulis mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa kadubale kecamatan Banjar, ditemukan belum optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa kadubale Banjar, dikarenakan sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa Kadubale yang bersifat otoriter atau tindakan kamauan sendiri yang selalu ingin dipandang benar. Dalam hal ini badan permusyawaratan desa (BPD) Kadubale banjar harus lebih intensif lagi dalam menyikapi sikap kepala desa dengan cara melakukan monitoring atau Pemantauan, controlling serta evaluasi agar kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Kata kunci: Kinerja BPD, Kualitatif, Kepala Desa.

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is one of the village government institutions whose role is to supervise the performance of the Village government. The village head is the only person who carries out the highest government function in the village. The village head plays a very important role in administering village government affairs, he is the holder of village authority. This research was conducted to find out how the BPD performs in supervising the performance of the Kadubale Banjar village head. The method used in this research is a qualitative method with interview techniques. Based on the results of the author's research and observations regarding the performance of the Village Consultative Body (BPD) in Kadubale Village, Banjar subdistrict, it was found that the performance of the Village Consultative Body (BPD) in supervising the performance of the Kadubale village head of Banjar was not optimal, due to the authoritarian leadership attitude of the Kadubale village head. or actions of your own will that you always want to be seen as right. In this case, the Kadubale Banjar Village Consultative Body (BPD) must be more intensive in responding to the village head's attitude by monitoring, controlling and evaluating so that the village head carries out his duties in accordance with his rights and obligations.

Keywords: BPD Performance, Qualitative, Village Head.



PENDAHULUAN

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu lembaga pemerintah desa yang Berperan Sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa, hal tersebut telah tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014. Menurut Hanif Nurholis (Jamaludin A.N 2015:111) bahwa "pemerintahan mempunyai tugas Pokok (1) Melaksanakan urusan Rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat (2) Menjalankan tugas membantu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten untuk membentuk suatu demokrasi di dalam pemerintah desa dibentuklah Badan Permasyarakatan desa (BPD). "Badan permusyawaratan Desa Adalah sebuah lembaga Yang Ada di desa yang dimana memiliki beberapa hak dan wewenang, Ada tiga tugas pokok badan Permasyarakatan desa yang pertama yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama kepala desa, yang kedua, menampung dan menggali aspirasi masyarakat, dan Yang ke tiga yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.

Kepala desa sebagai satu-satunya orang yang menjalankan fungsi pemerintahan tertinggi di Desa, Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan desa. Beliau lah pemegang kekuasaan desa. Kinerja Kepala desa menentukan Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan tujuan urusan Pemerintahan desa. Otonomi desa berarti meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat dan Mengupayakan tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi penulis mengenai kinerja Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

kadubale kecamatan Banjar, ditemukan belum optimalnya kinerja badan Permasyarakatan desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa kadubale Banjar, dikarenakan sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa kadubale yang bersifat Otoriter atau tindakan kaula sendiri yang selalu ingin dipandang benar. Namun badan Permasyarakatan desa (BPD) tidak begitu saja mengiyakan keputusan kepala desa Akan tetapi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melakukan Evaluasi musyawarah desa (MUSDES) terlebih dahulu untuk menentukan tata kelola kerja Pemerintahan desa agar lebih Maksimal.

Berdasarkan uraian diatas badan permusyawaratan desa (BPD) Kadubale banjar harus lebih Intensif lagi dalam menyikapi sikap kepala desa dengan cara melakukan monitoring atau Pemantauan, controlling serta Evaluasi agar kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan Kewajibannya. dan kepala desa juga Harus bersifat transparansi atau terbuka dalam pelaksanaan pemerintahan guna menghasilkan Sebuah pemerintahan yang baik (good governance), untuk menghindari penilaian Negatif dari masyarakat terhadap pemerintah desa..

Menurut (Kasmir, 2017, hal.182) kinerja merupakan hasil kerja Dan perilaku kerja seseorang dalam Suatu priode, biasanya satu tahun. Kemudian kinerja dapat diukur dari Kemampuannya menyelesaikan Tugas-tugas dan tanggung jawab Yang diberikan. Artinya dalam kinerja Mengandung unsur standar Pencapaian harus dipenuhi, sehingga Bagi yang mencapai standar yang Telah ditetapkan berarti seseorang Telah berkinerja dengan baik atau Sebaliknya bagi yang tidak tercapai Dikategorikan berkinerja kurang atau Tidak baik



Menurut Sudarmanto (2009:11), “Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja”. Ukuran-ukuran dijadikan tolak ukur Dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena akan Bermanfaat bagi banyak pihak. Menurut Miner dalam Sudarmanto (2009:11-12)

Mengungkapkan 4 (empat) dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai Kinerja, yaitu:

1. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan waktu kerja efektif/jam kerja hilang
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif.

Menurut Sugiono (2015:15), menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan Untuk meneliti kondisi Objek yang alamiah. (Sebagai lawannya Eksperimen) peneliti adalah instrumen Kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi “bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian Dengan cara Wawancara, Menurut Sugiyono (2020:114), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di-

kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada tanggal 06 November 2023 yang berlokasi di Desa kadubale kecamatan Banjar.

Subjek penelitian yang ikut serta berperan dalam membantu kegiatan penelitian ini terdiri dari 2 (dua) orang Informan yaitu:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Kadubale Banjar
2. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kadubale Banjar

Menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penggunaan sistem data primer yang terdiri dari penulis dan dua informan subjek penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi lapangan berupa wawancara atau tanya jawab antara penulis dengan informan di desa untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kadubale kecamatan Banjar.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Dengan cara penarikan kesimpulan dari hasil wawancara atau tanya jawab antara penulis dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfokus terhadap Penelitian kinerja BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian Ini penulis Dapat mengetahui Informasi mengenai Kinerja Badan permusyawaratan Desa Kadubale kecamatan Banjar, Adapun yang menjadi fokus



penelitian yaitu Kinerja Dari Badan Permusyawaratan Desa, Menurut Sudarmanto (2009:11) ada beberapa tolak ukur mengenai kinerja:

Indikator kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

1. Kualitas

Berdasarkan Hasil dari Wawancara penulis dengan sebagian informan dari desa mengenai Kinerja Badan permusyawaratan desa (BPD) Kadu-bale Banjar. Dapat diketahui bahwa Badan permusyawaratan Desa (BPD) kurang maksimal dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap Kepala Desa karena terhalang oleh sikap Kepala desa yang otoriter.

Dan menurut Masyarakat, Kualitas suatu kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kadubale kecamatan Banjar terhadap kepala desa juga belum optimal karena masih banyak pembangunan yang belum terlaksana contohnya yaitu mengenai pembangunan infrastruktur jalan Desa.

2. Kuantitas

Menurut hasil penelitian penulis mengenai kinerja Badan permusyawaratan Desa (BPD) kadubale cukup baik membantu kepala desa dalam Hal mendengar Aspirasi masyarakat karena banyaknya keluhan dari masyarakat desa kadubale mengenai belum meratanya pembagian dana dari Program Bantuan langsung Tunai (BLT) dengan cara mendata kembali mana yang berhak dan tidaknya dalam menerima program tersebut.

3. Penggunaan waktu Dalam bekerja

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya Desa Kadubale Banjar

Membutuhkan ruang kerja agar waktu kerja dapat dimanfaatkan Sebagus apa pun, hal ini guna meningkatkan efisiensi kerja. Untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, kita harus memperhatikan faktor-faktor berikut Secara signifikan mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Satu Faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja dapat dilihat dari jam kerja karyawan Inilah sebabnya mengapa pemanfaatan waktu sangat penting dalam konsep manajemen kerja

4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja

Kerja sama dalam bekerja di dalam lembaga Badan permusyawaratan desa (BPD) bukan hanya dengan kepala desa saja melainkan dengan Anggota BPD yang terdiri dari RW, RT, tokoh masyarakat, pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat.

Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa Kadubale Kecamatan Banjar

Pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa kadubale kecamatan Banjar didukung oleh beberapa faktor:

1. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Mathis dan Jackson, (2006:3) SDM adalah “rancangan sistem Formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia Secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi”. SDM Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kadubale kecamatan Banjar meliputi Ketua BPD, Wakil ketua



BPD, Dan Anggota BPD yang terdiri dari RW, RT, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama yang Akan berperan membantu kepala desa dalam sebuah pembangunan dengan cara Musyawarah desa (MUSDES).

2) Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 893 & 999) mengatakan Prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Sedangkan sarana adalah segala sesuatu (bisa Berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam Mencapai maksud dan tujuan

Sarana dan prasarana di Desa kadubale kecamatan Banjar cukup baik, Dilihat dari kondisi kantor desa yang cukup bersih dan rapih dan Terdapat juga beberapa fasilitas elektronik, alat transportasi kesehatan (Ambulance) dan internet guna mempermudah pekerjaan para pemerintah desa.

2. Faktor Eksternal

Seharusnya Faktor Eksternal disini yaitu masyarakat, Menurut Paul B. Horton (Muin, idianto, 2013: 25-26) masyarakat adalah “sekumpulan manusia Yang relative mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, Mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan Sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa Kadubale kecamatan Banjar

Sikap Kepala desa kadubale Banjar dalam memimpin yaitu bersifat “gimana saya” atau kemauan sendiri (Otoriter).Pemimpin yang otoriter dalam pengambilan keputusan atau seluruh kegiatan sepenuhnya di kontrol oleh pemimpin, sehingga gaya kepemimpinan otoriter ini akan berdampak tidak adanya kebersamaan dan kegiatan yang bisa saja tidak terarah (Dinda Putri Halilintar, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini terkait Kinerja Badan Permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa kadubale Banjar maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Badan permusyawaratan desa (BPD) Kadubale Banjar. Dapat diketahui bahwa Badan permusyawaratan Desa (BPD) kurang maksimal dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap Kepala Desa karena terhalang oleh sikap Kepala desa yang otoriter.
2. Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa Kadubale Kecamatan Banjar terdiri dari dua faktor yaitu:
 - 1) faktor internal
 - sumber daya manusia (SDM)
 - sarana dan prasarana
 - 2) faktor Eksternal
 - Seharusnya Faktor Eksternal disini yaitu masyarakat, Menurut Paul B. Horton (Muin, Idianto, 2013: 25-26) masyarakat adalah “sekumpulan manusia Yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, Mendiami



suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan Sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

3. Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja kepala desa Kadubale kecamatan Banjar

Faktor penghambat kinerja BPD Kadubale yaitu Sikap Kepala desa kadubale Banjar dalam memimpin yaitu bersifat “gimana saya” atau kemauan sendiri (Otoriter). Pemimpin (kepala desa) yang otoriter dalam pengambilan keputusan atau seluruh kegiatan sepenuhnya dikontrol oleh pemimpin (kepala desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, M. S. (2021). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Studi Di Desa Toidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. *IPDN Jatinangor*.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok: Rajawali i Pers.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan: Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Undang-undang no 06 Tahun 2014 tentang desa
- Yuliananingsih, Y., Novianty, F., & Jumiati, J. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *SalHorizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 123-134.